



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 3
Jenis Rapat	: Audiensi Komisi VIII DPR RI
Dengan	: Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 6 Maret 2024
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Masukan terkait Anggaran BNPB/BPBD Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, SS., M.Si.
Hadir	: dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag. dan didampingi oleh Para Anggota John Kenedy Aziz, S.H., M.H., (F-PG), Matindas J.Rumambi, S.Sos (F-PDIP) sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Audiensi Komisi VIII DPR RI bersama DPRD Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan mengenai **Anggaran BNPB/BPBD Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan** dapat dicatat sebagai berikut:

1. Penjelasan dari Pimpinan Komisi VIII DPR RI mengenai mekanisme dan program BNPB termasuk Dana Dana Siap Pakai (DSP) dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) yang rutin dilaksanakan oleh BNPB. Selain itu ada bantuan logistik seperti bantuan kendaraan kebencanaan.
2. Ketua DPRD Kotabaru dalam penjelasannya mengenai Anggaran BPBD Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan yakni :
 - a. Luas wilayah $\frac{1}{4}$ dari seluruh Kalimantan Selatan.
 - b. Dengan kondisi geografis yang sangat luas namun tidak dapat mencukupi program dan anggaran kebencanaan.
 - c. Telah dilakukan kunjungan ke BNPB, sejak 2022 proposal sudah diserahkan.
 - d. Kec. Pulau Sembilan, sembilan jam menuju ke lokasi yang pernah mengalami gempa bumi.
 - e. Mengajukan permohonan kepada Komisi VIII DPR RI untuk membantu sarana dan peralatan serta logistik untuk Kabupaten Kotabaru. (proposal terlampir).
3. Penjelasan Kaban BPBD Kabupaten Kotabaru :
 - a. Belum ada tindak lanjut dari BNPB terkait permohonan proposal sejak 2022.
 - b. Pemenuhan alat untuk Pusdalops BPBD Kabupaten Kotabaru.

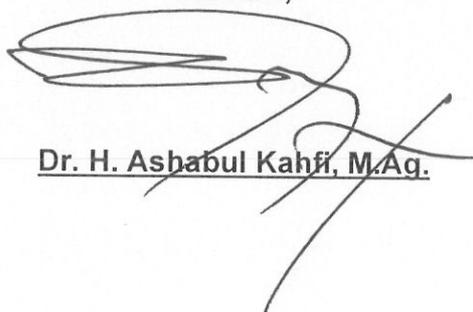
Pandangan dan Masukan Anggota Komisi VIII DPR RI:

- a. Penambahan peralatan dan logistik kebencanaan menyesuaikan kebutuhan yang ada di daerah seperti speedboat.
- b. Akan menyampaikan permohonan DPRD Kabupten Kotabaru dan BPBD Kotabaru meskipun tidak ada perwakilan dapil di Komisi VIII DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.20 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.